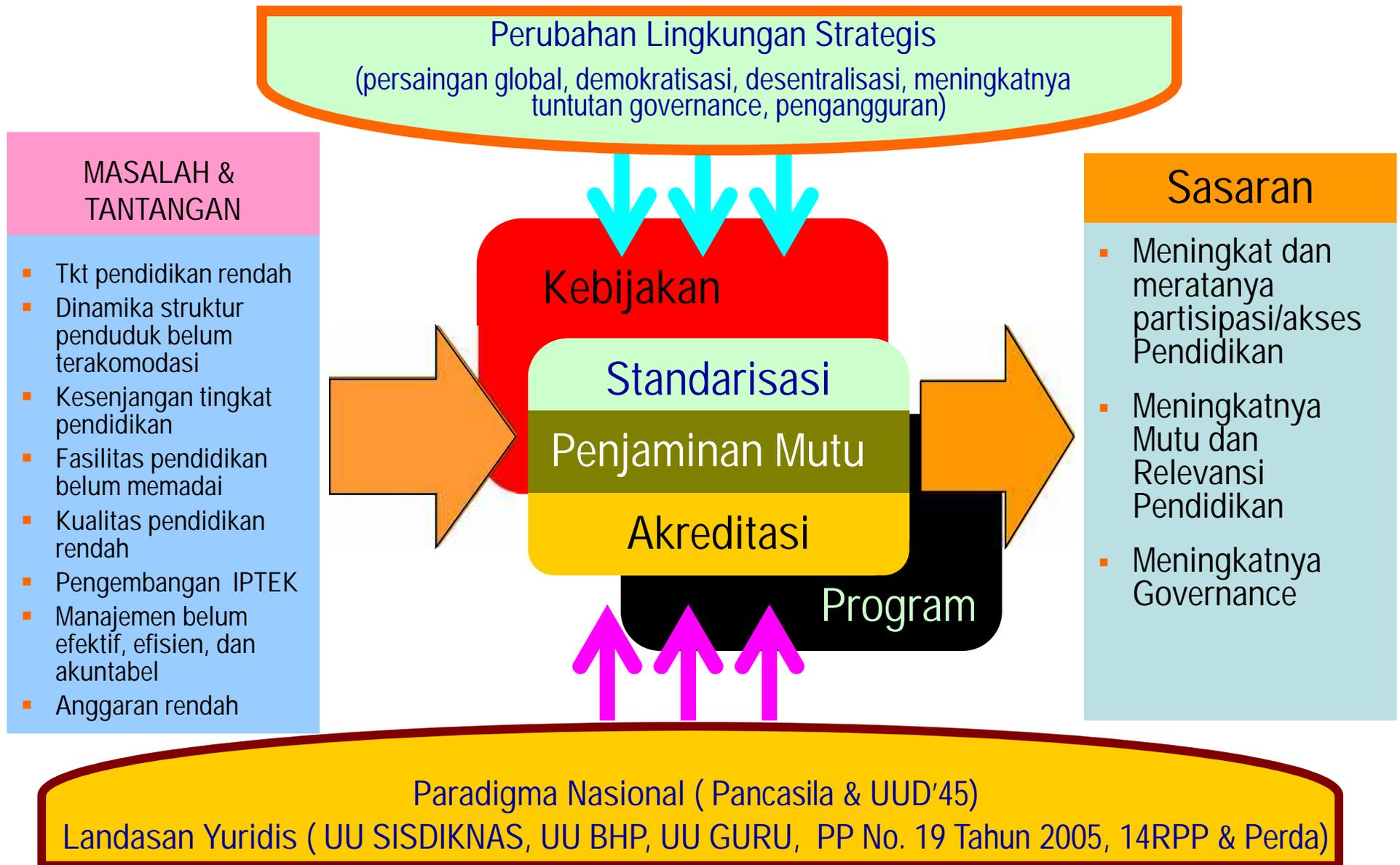


**SUPLEMEN BAHAN KULIAH Ravik Karsidi:**  
**KONSEPSI DAN POLA PIKIR PENGEMBANGAN**  
**KEBIJAKAN DAN PROGRAM**  
**PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**(CONTOH Kajian Kebijakan Kementerian**  
**Diknas RI, 2010 )**

**Bahan Kuliah (7)**

**S3 Ilmu Pendidikan, 2018**

# Konsepsi dan Pola Pikir Pengembangan Kebijakan dan Program Pembangunan Pendidikan Nasional





# UU No. 20 Tahun 2003 SISDIKNAS

## BAB XI - PASAL 39

### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### AYAT 1

##### **PENDIDIK:**

Merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

#### AYAT 2

##### **TENAGA KEPENDIDIKAN:**

Bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan

# TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(UU SISDIKNAS & PP NO.19 TAHUN 2005)

**Pada TK/RA  
terdiri atas :**  
kepala TK/RA,  
tenaga kebersihan.

**Pada SD/MI  
terdiri atas :**  
kepala sekolah/madrasah,  
tenaga administrasi,  
tenaga perpustakaan,  
tenaga kebersihan.

**Pada SMK/MAK  
tediri atas :**  
tenaga administrasi,  
kepala sekolah/madrasah,  
tenaga perpustakaan,  
tenaga laboratorium,  
tenaga kebersihan

**Pada SDLB, SMPLB  
SMALB tediri atas :**  
kepala sekolah,  
tenaga administrasi,  
tenaga perpustakaan,  
tenaga laboratorium,  
tenaga kebersihan ,  
teknisi sumber belajar,  
psikolog,  
pekerja sosial,  
terapis.

**Pada SMP/MTs dan  
SMA/MA tediri atas :**  
kepala sekolah/madrasah,  
tenaga administrasi,  
tenaga perpustakaan,  
tenaga laboratorium,  
tenaga kebersihan .

# Spektrum Tenaga Kependidikan

Kepala Sekolah

Adminstrasi  
Pustakawan  
Laboran

Pendidik

Peserta  
Didik



# KERANGKA PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

## LINGKUNGAN EKSTERNAL:

- Persaingan Global
- Desentralisasi
- Tuntutan *Governance* dan Akuntabilitas

## LINGKUNGAN INTERNAL:

- UU SISDIKNAS
- PP Nomor 19 Tahun 2005
- PP Nomor 8 Tahun 2005
- Renstra Depdiknas

## MANAGEMENT PROGRAM PENGEMBANGAN TENDIK

### PENGADAAN TENDIK:

- *Equal Employment Opportunity*
- Pemetaan
- Seleksi / Rekrutmen
- Pemerataan Sebaran

### PENGEMBAGNAN TENDIK:

- Kompetensi
- Sertifikasi
- Pendidikan dan Pelatihan
- *Capacity Building*
- Pengembangan Karier

### PENGHARGAAN:

- Evaluasi Kinerja
- Penghargaan atas Kinerja dan Prestasi
- Promosi
- Perlindungan

FOKUS KEPADA MUTU DAN PROFESIONALITAS TENDIK

MUTU PENDIDIKAN

# ANALISIS SITUASI

**PEMERATAAN  
DAN  
PERLUASAN  
AKSES**

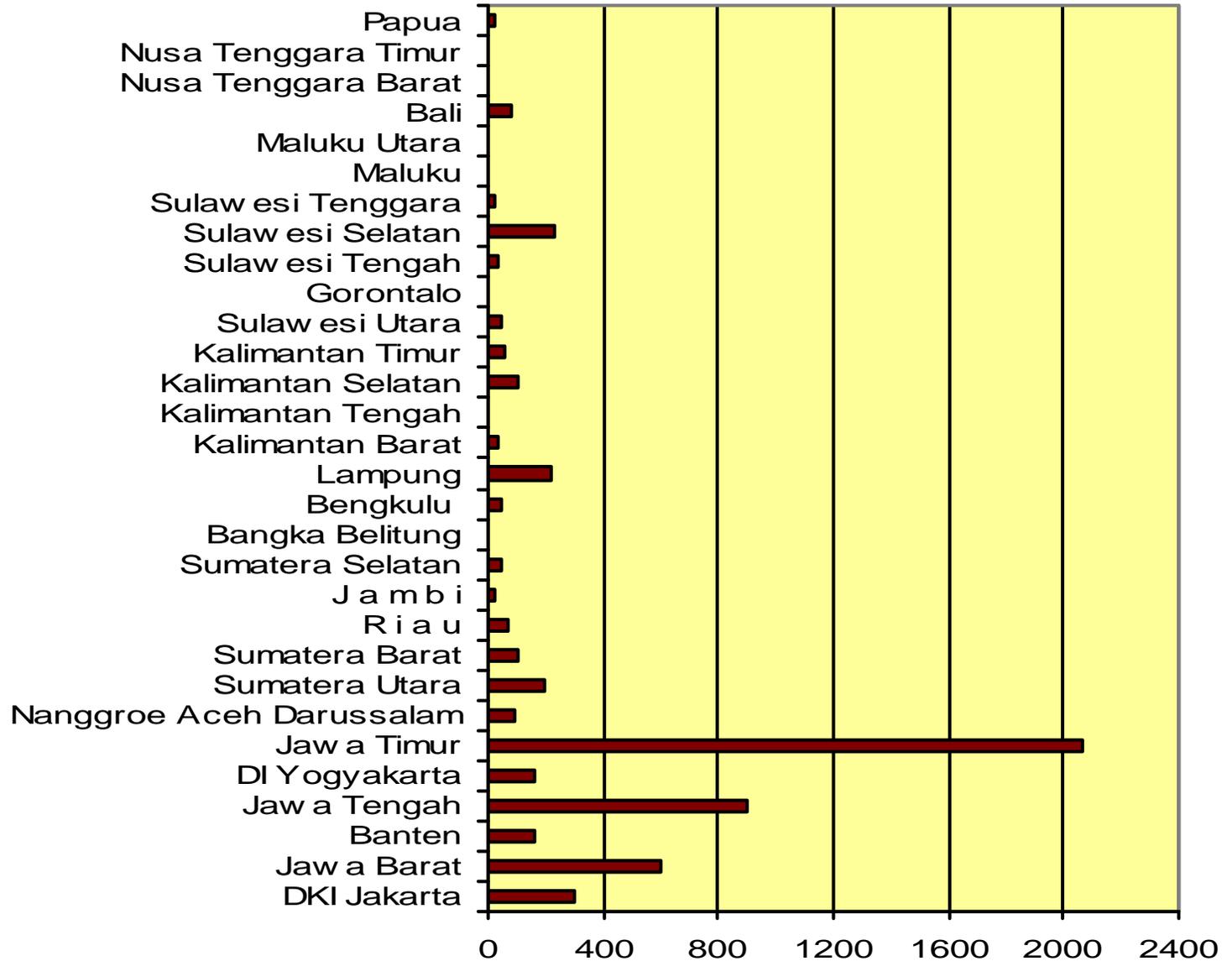
**PENINGKATAN  
MUTU DAN  
RELEVANSI**

**GOVERNMENT,  
AKUNTABILITAS  
DAN  
PENCITRAAN  
PUBLIK**

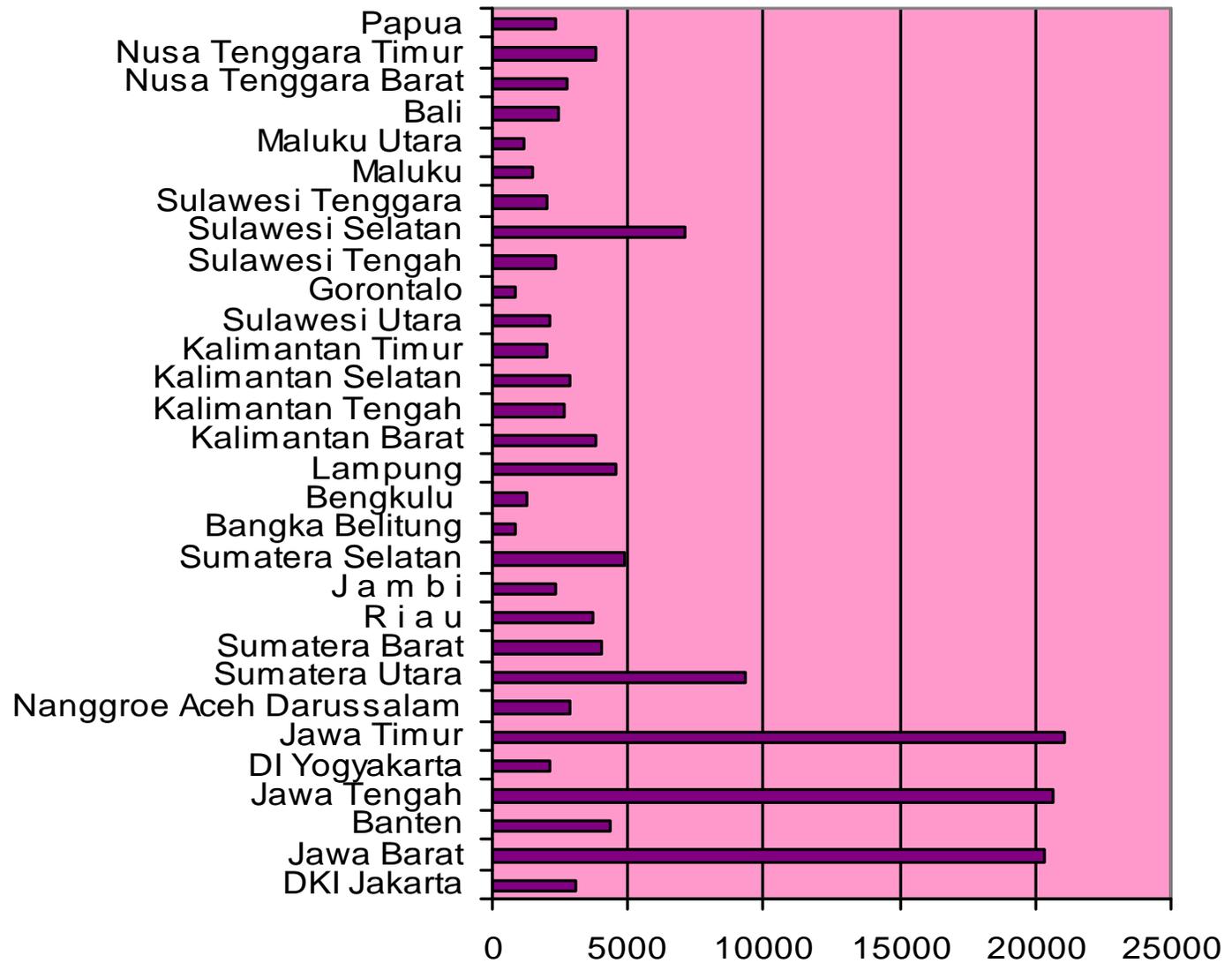


# **PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES**

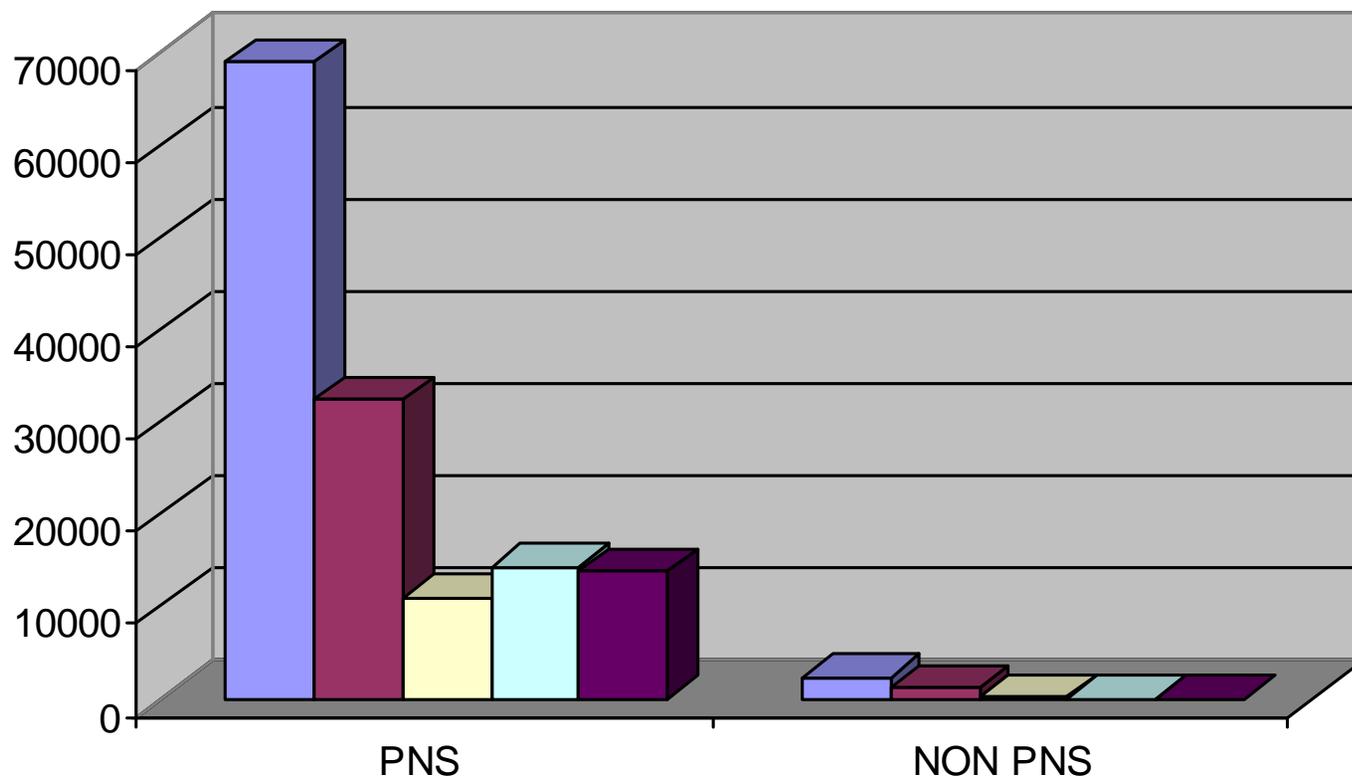
## Pendidikan Kepala Sekolah Berjajar Sarjana Menurut Propinsi



## Jumlah Kepala Sekolah SD Tiap Propinsi

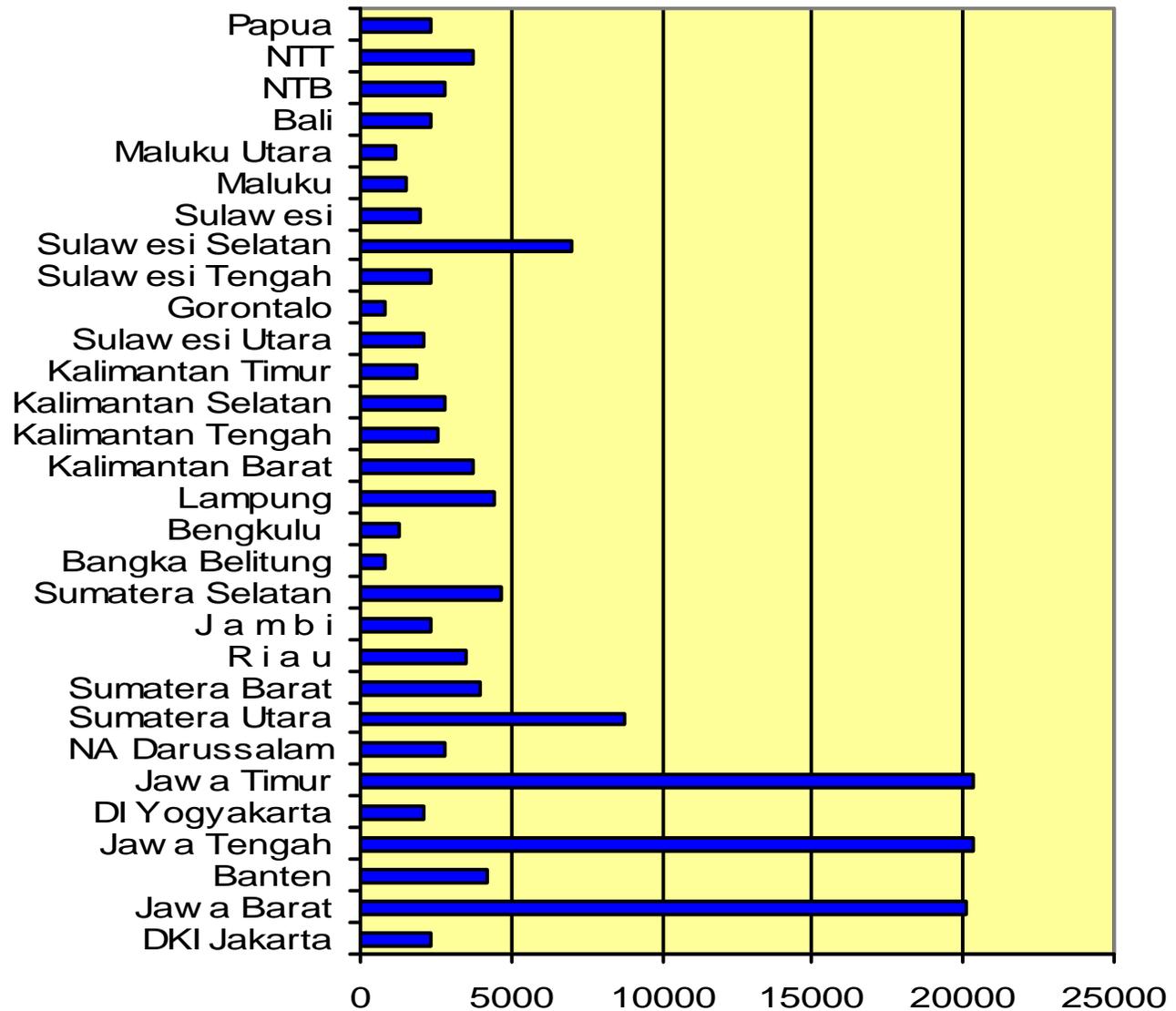


## Status Kepegawaian Kepala Sekolah SD Tiap Wilayah Indonesia

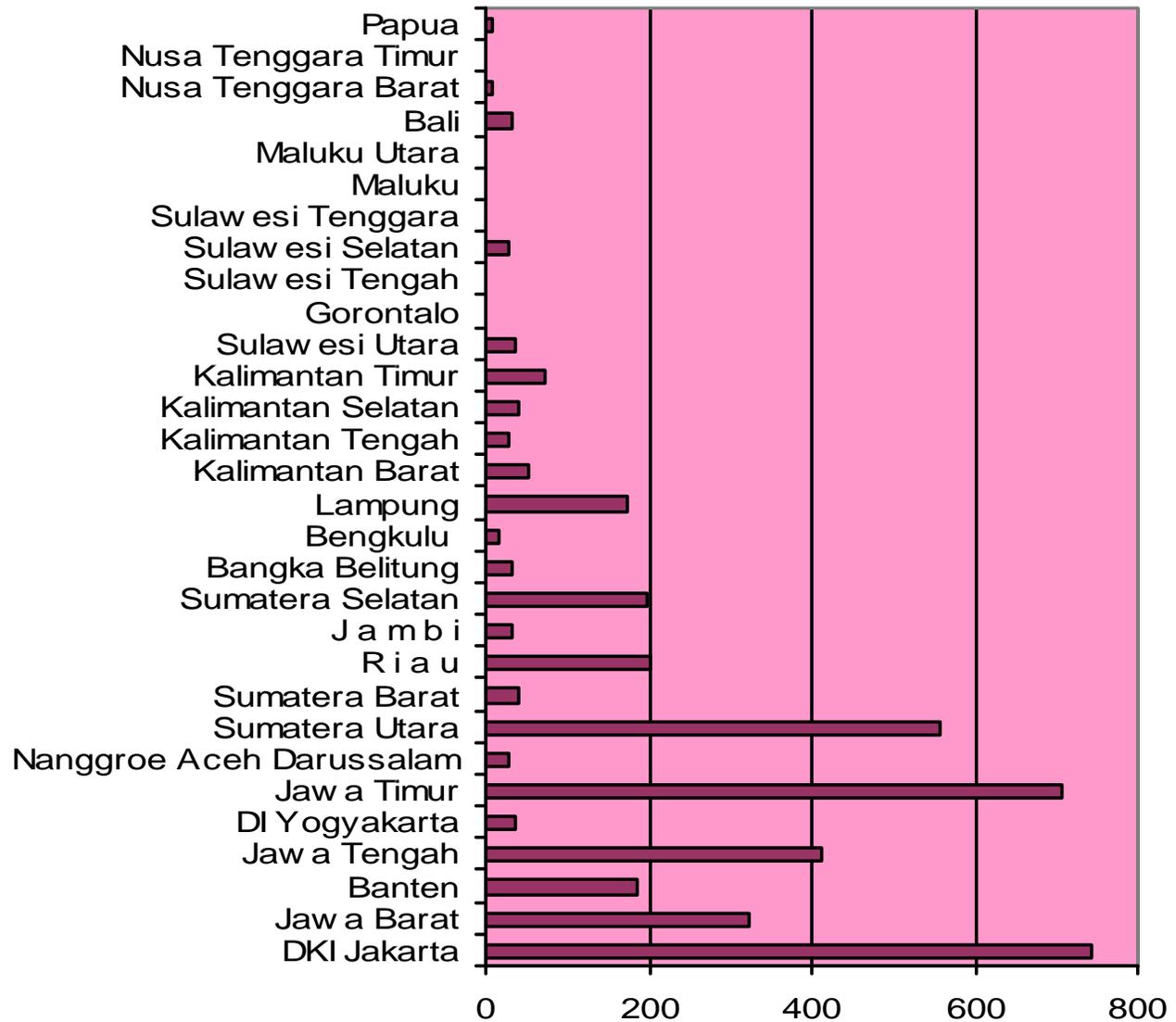


■ Jawa ■ Sumatra ■ Kalimantan ■ Sulawesi ■ Kepulauan Indonesia Timur

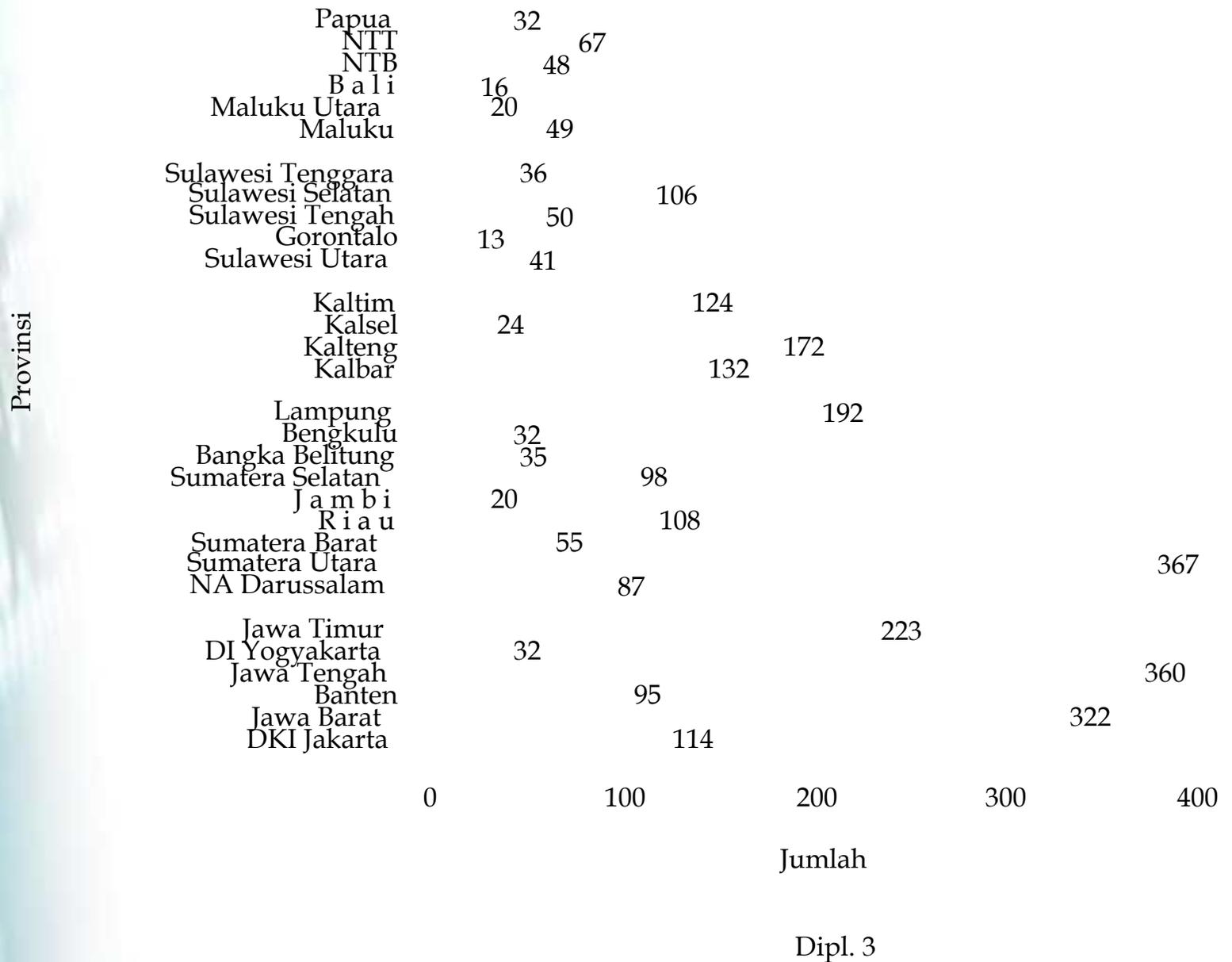
## Kepala Sekolah SD Berstatus PNS



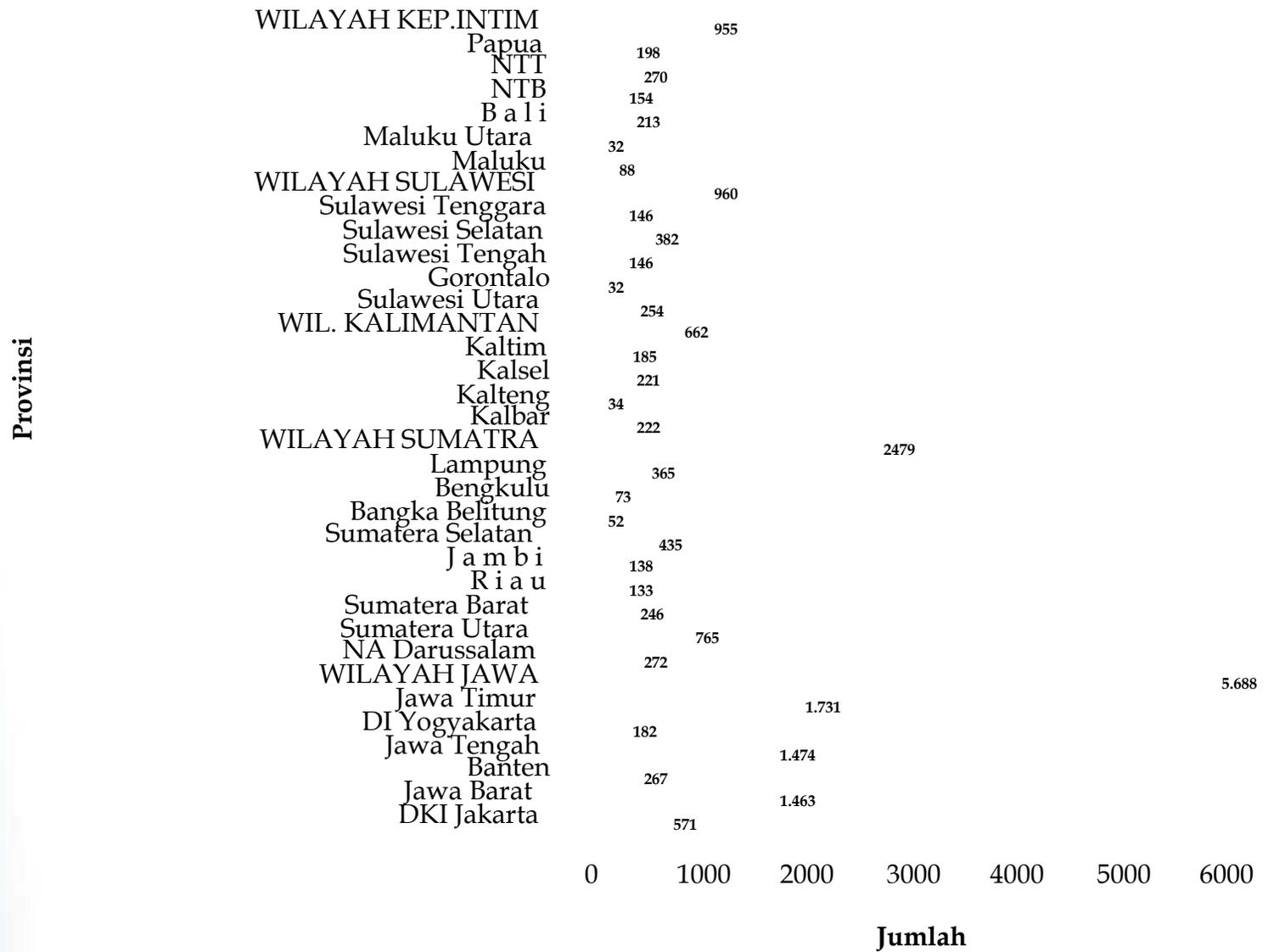
## Kepala Sekolah SD Berstatus NON PNS



## PENDIDIKAN KEPALA SMP BERIJAZAH D3 MENURUT PROPINSI

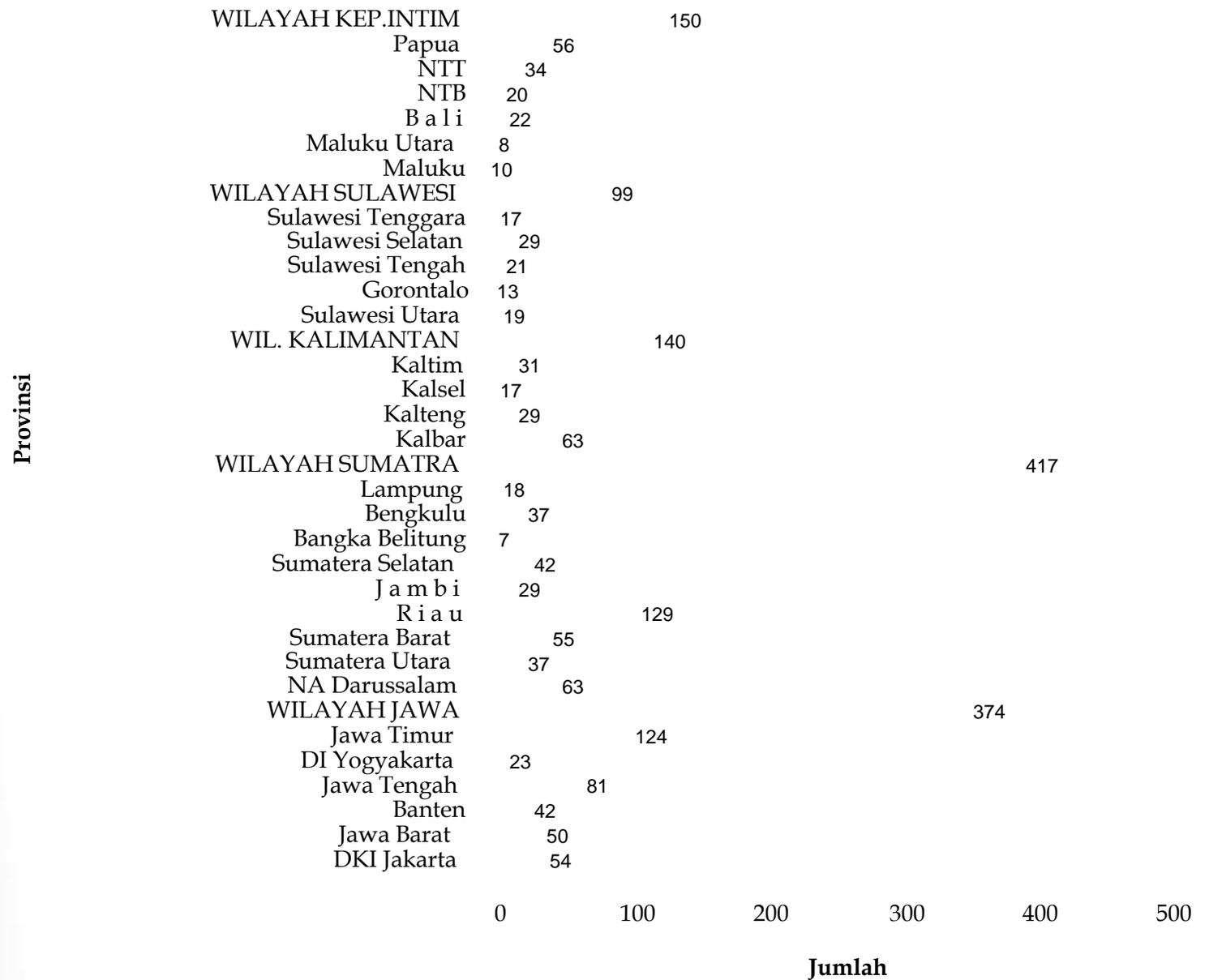


## PENDIDIKAN KEPALA SMP BERIJAZAH SARJANA MENURUT PROPINSI

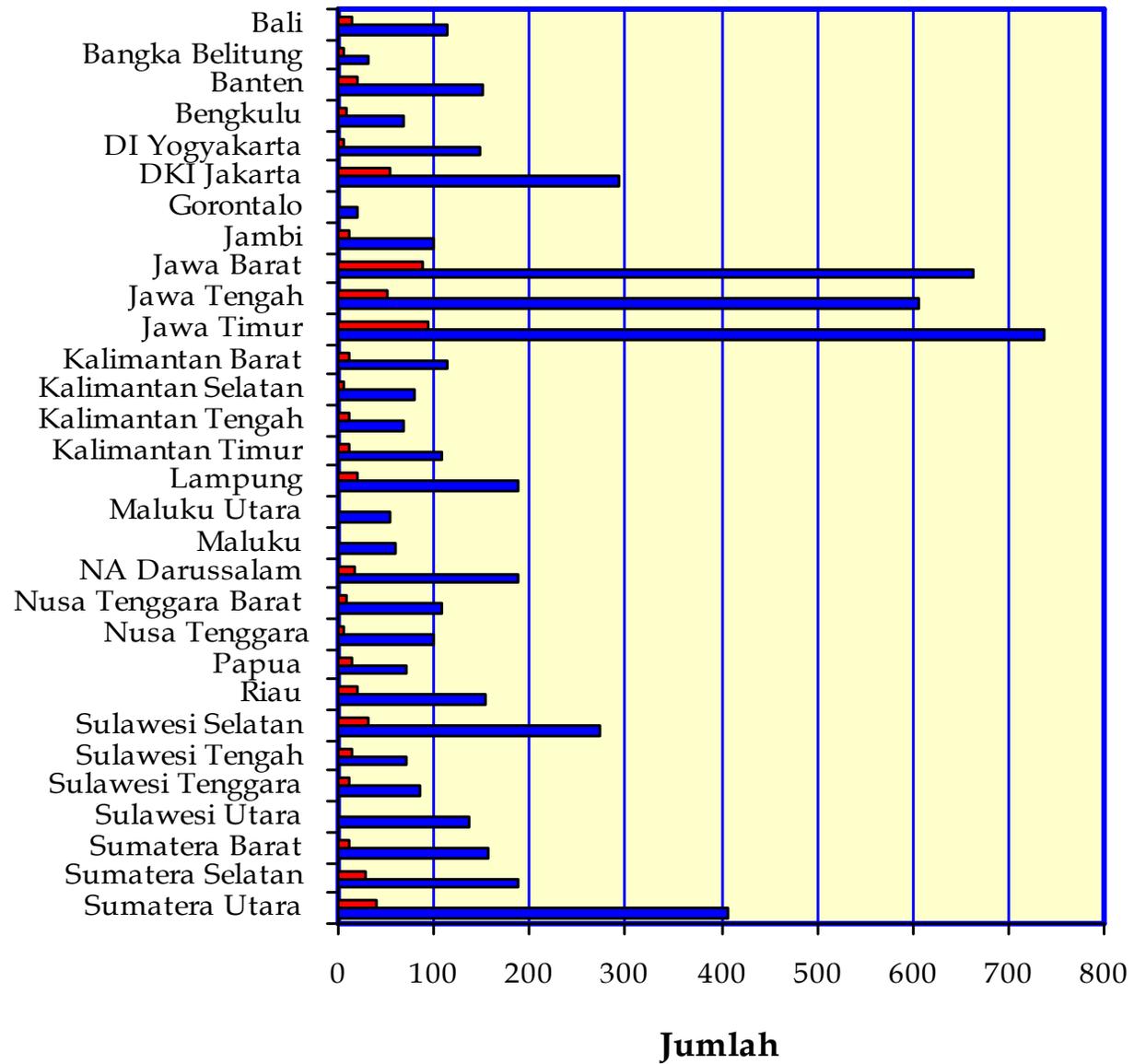


Sarjana

## PENDIDIKAN KEPALA SMP BERIJAZAH PASCASARJANA MENURUT PROPINSI

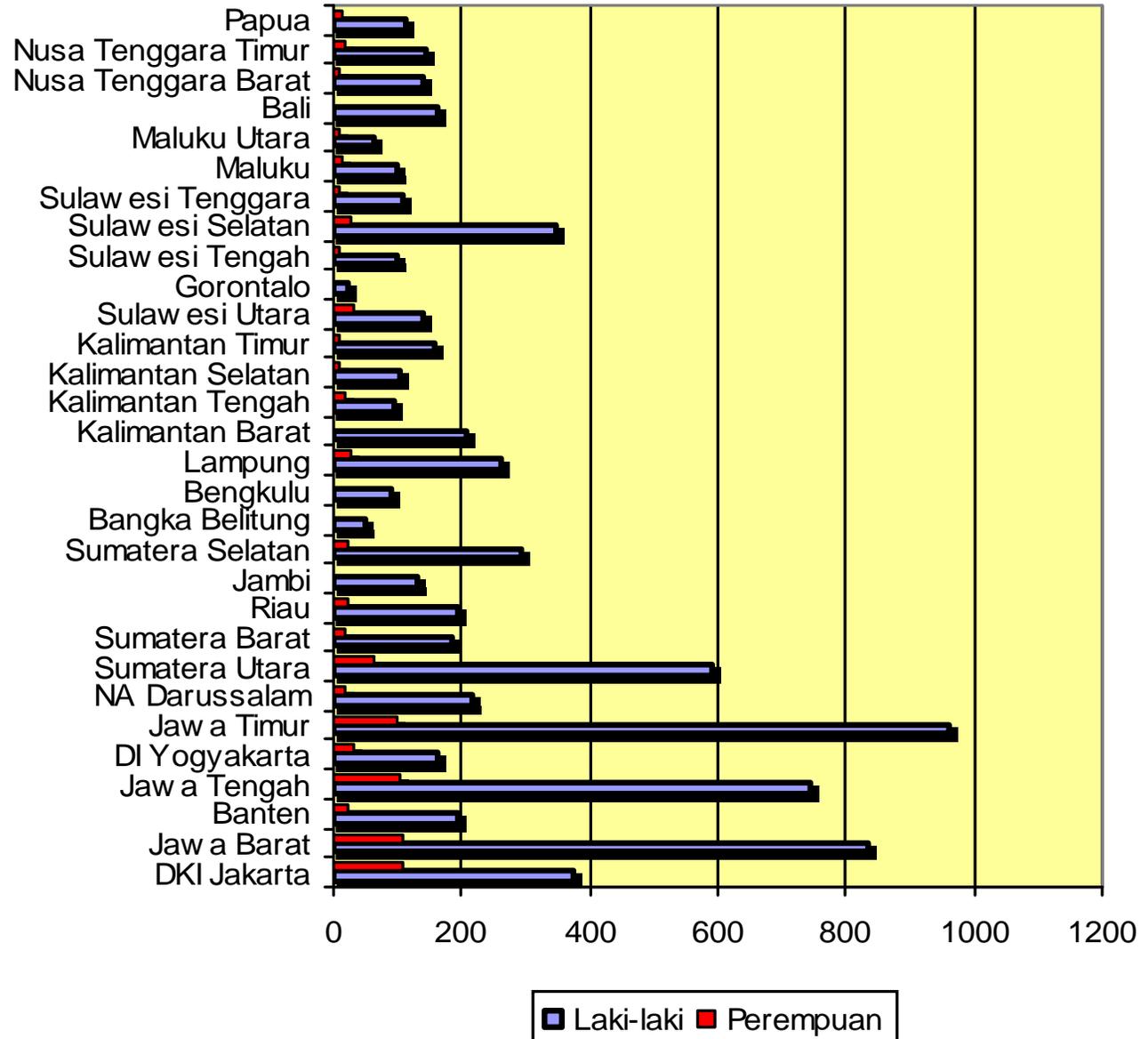


## Jumlah Kepala SMA Berijazah Sarjana

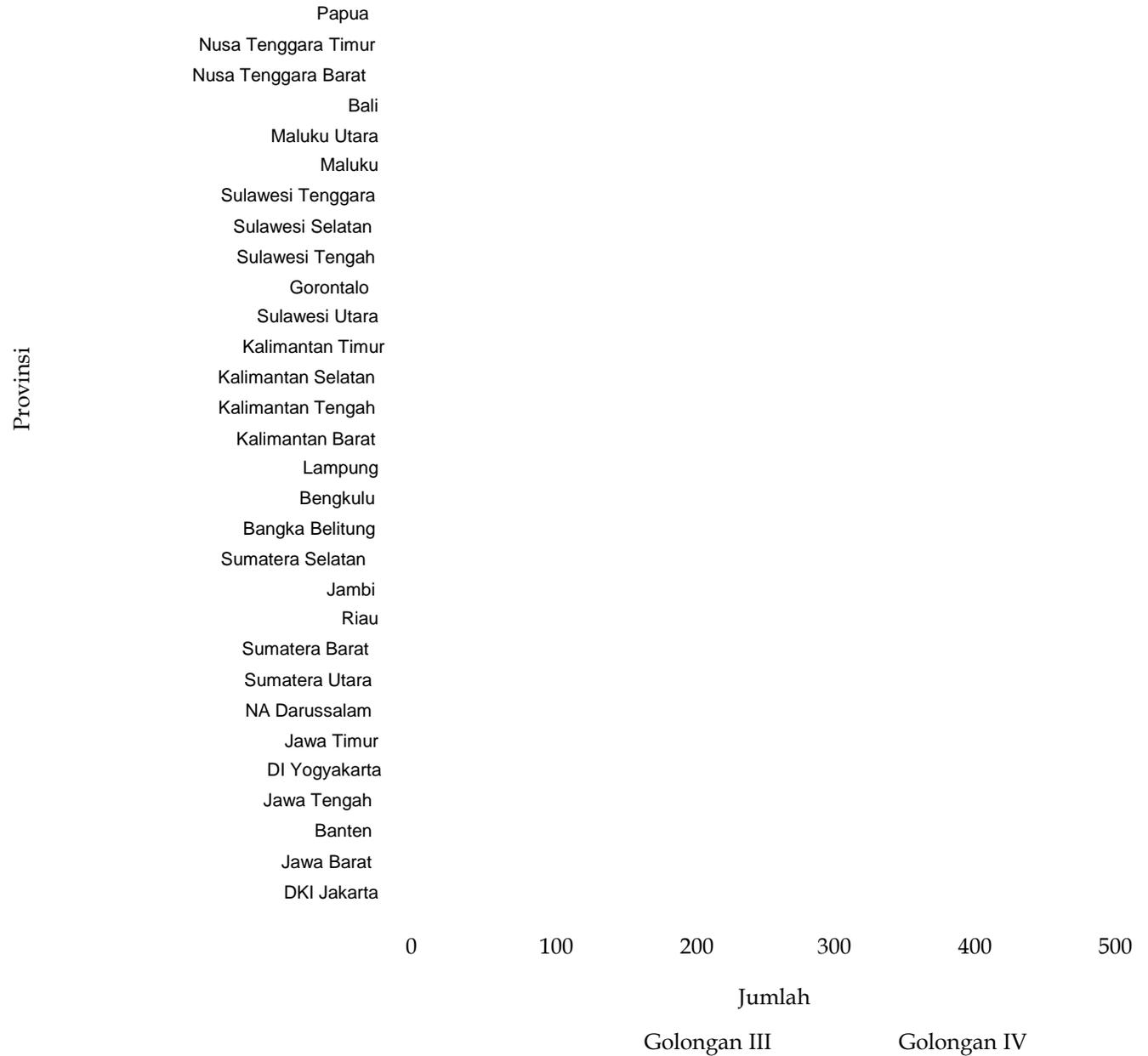


■ SARJANA Keguruan ■ SARJANA Non Keg.

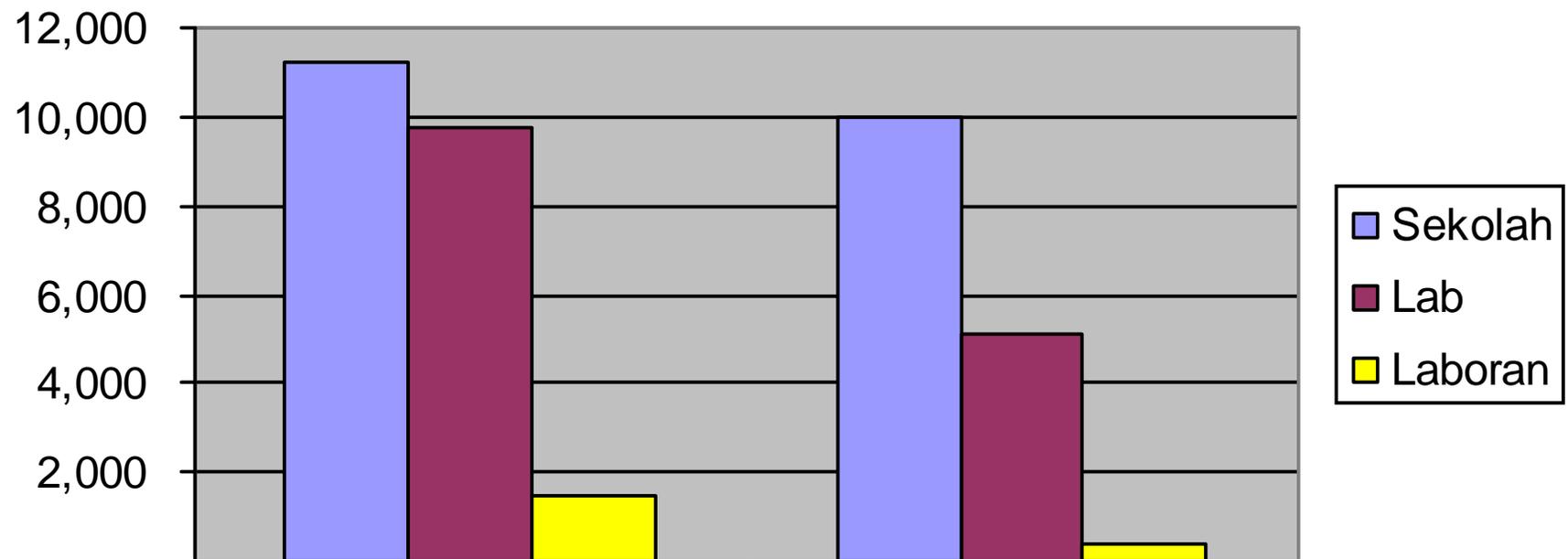
## Jumlah Kepala Sekolah SMA Menurut Jenis Kelamin



# Jumlah Kepsek SMA Menurut Golongan/Pangkat



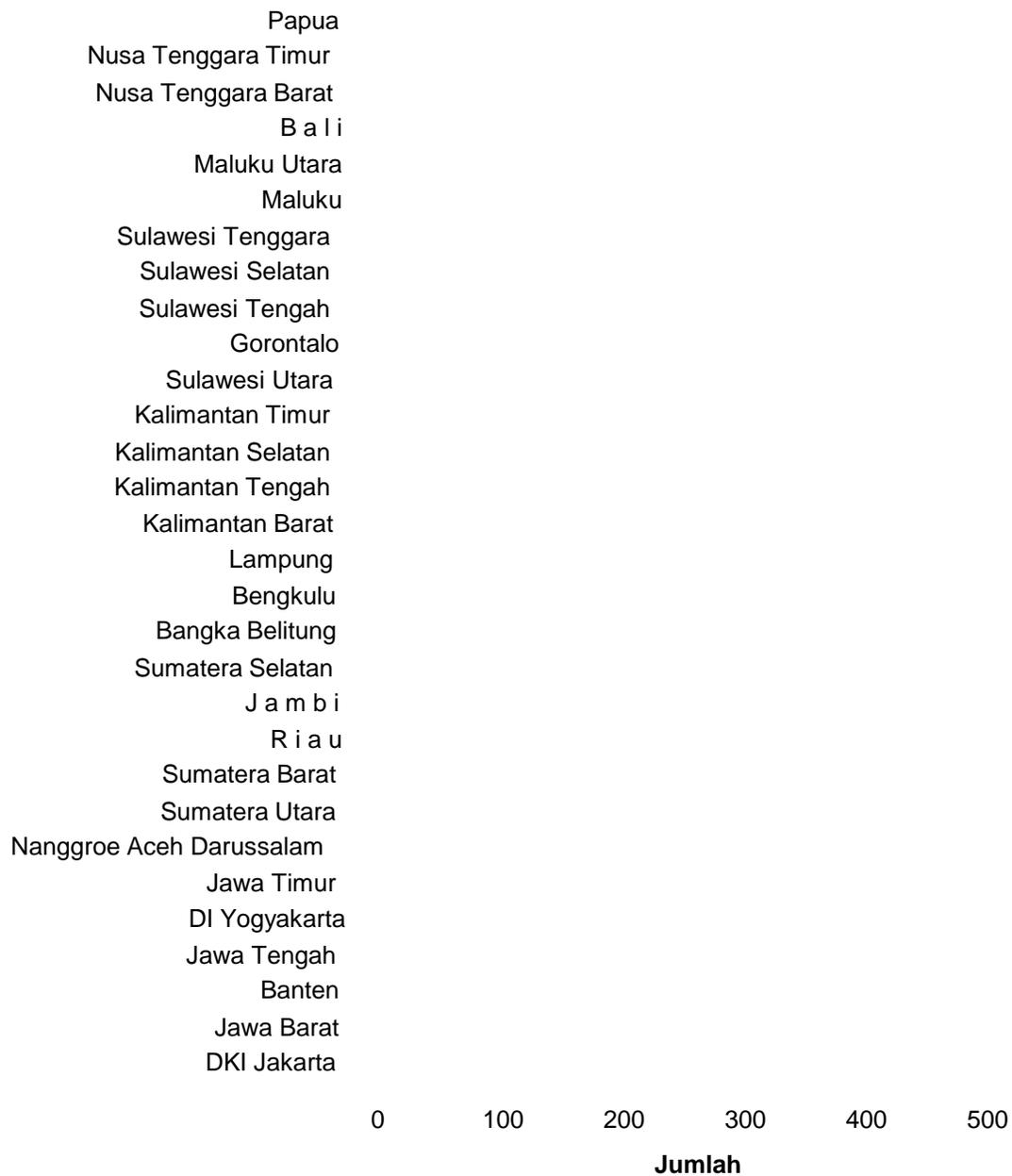
# JUMLAH LABORAN SMP



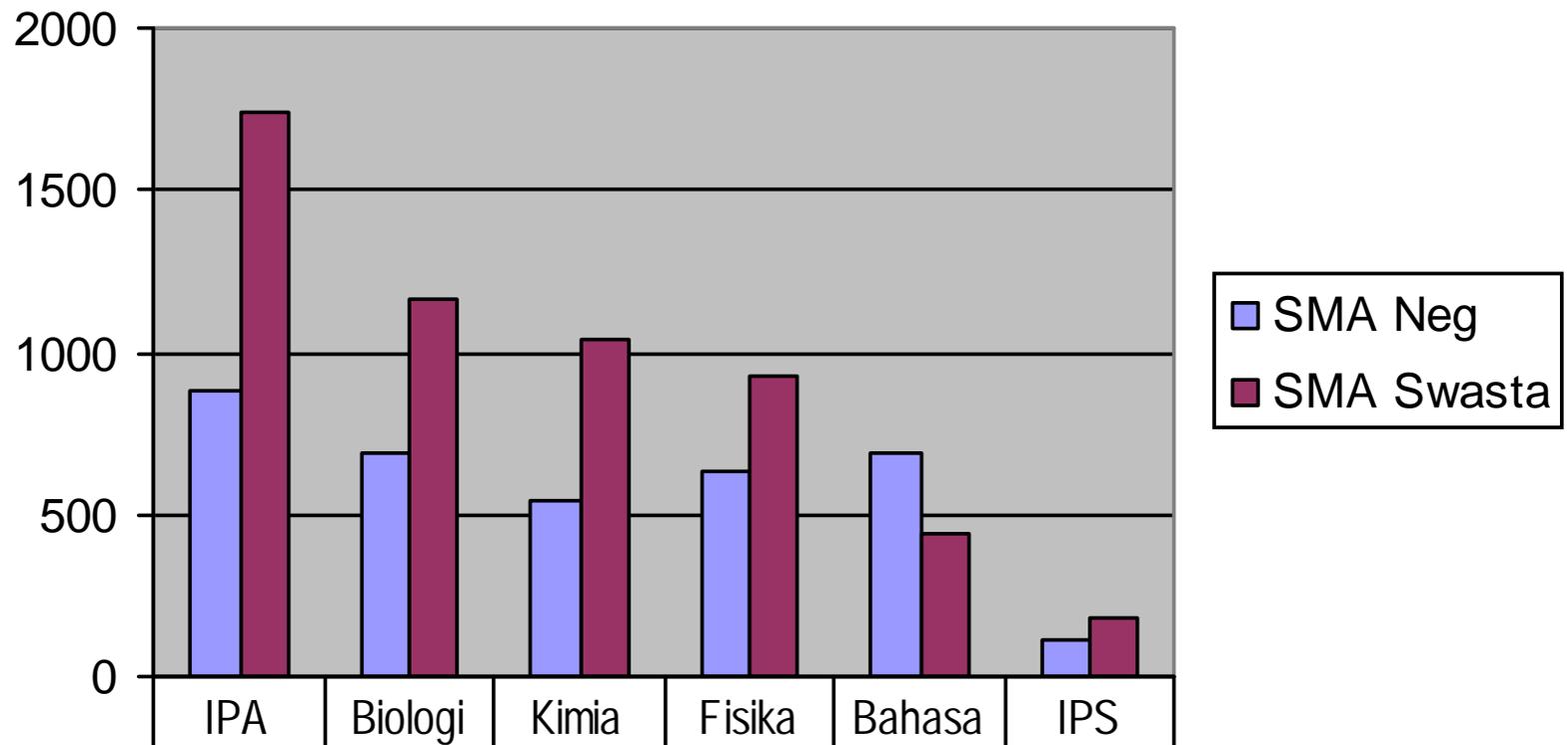
■ Sekolah	11,234	10,022
■ Lab	9,792	5,108
■ Laboran	1,501	391

## Jumlah Laboran SMP Tiap Propinsi Se Indonesia

Propinsi

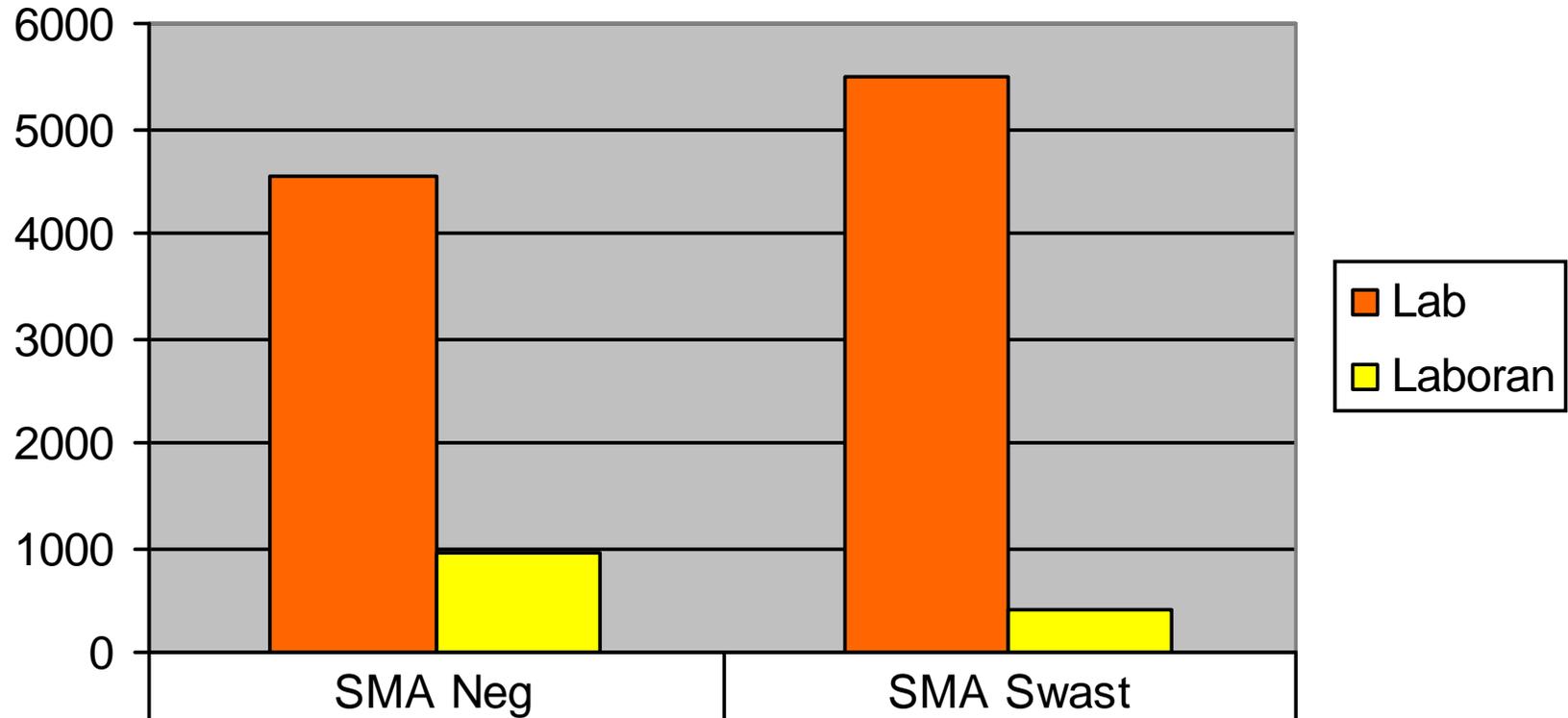


# LABORATORIUM SMA NEGERI DAN SWASTA



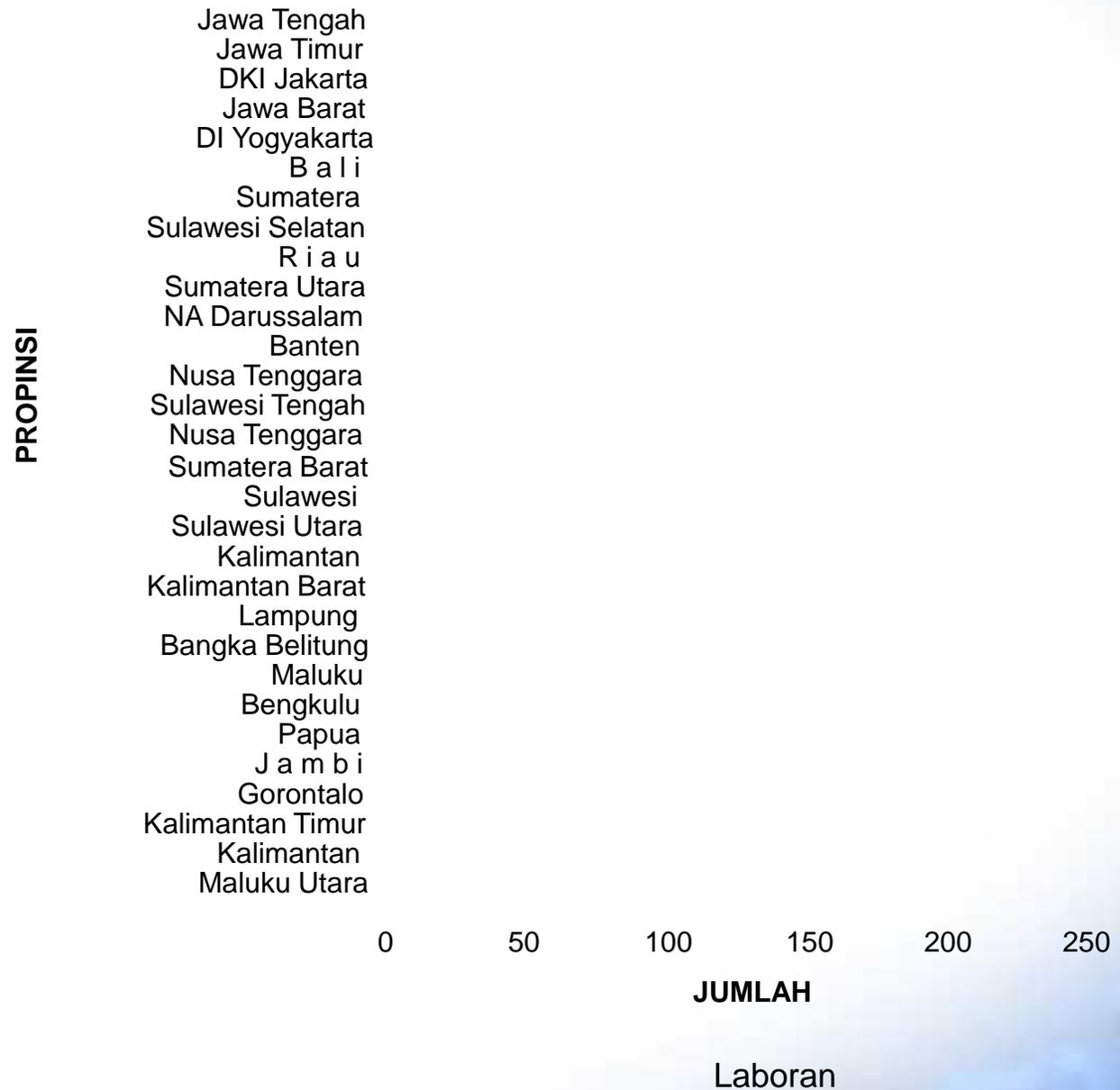
■ SMA Neg	887	692	546	636	684	111
■ SMA Swasta	1740	1161	1043	927	441	182

# JUMLAH LABORAN SMA

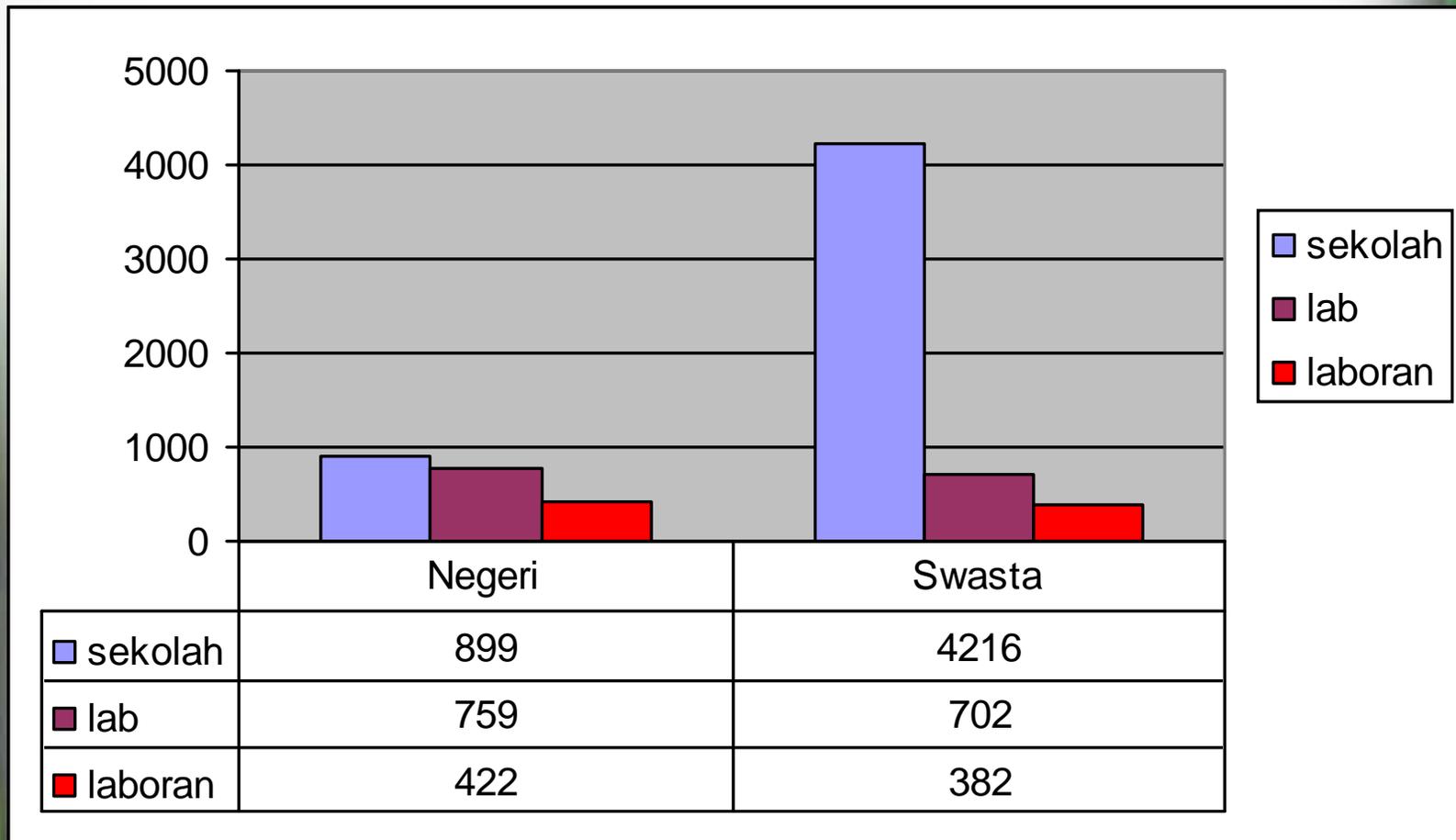


Lab	4556	5494
Laboran	939	416

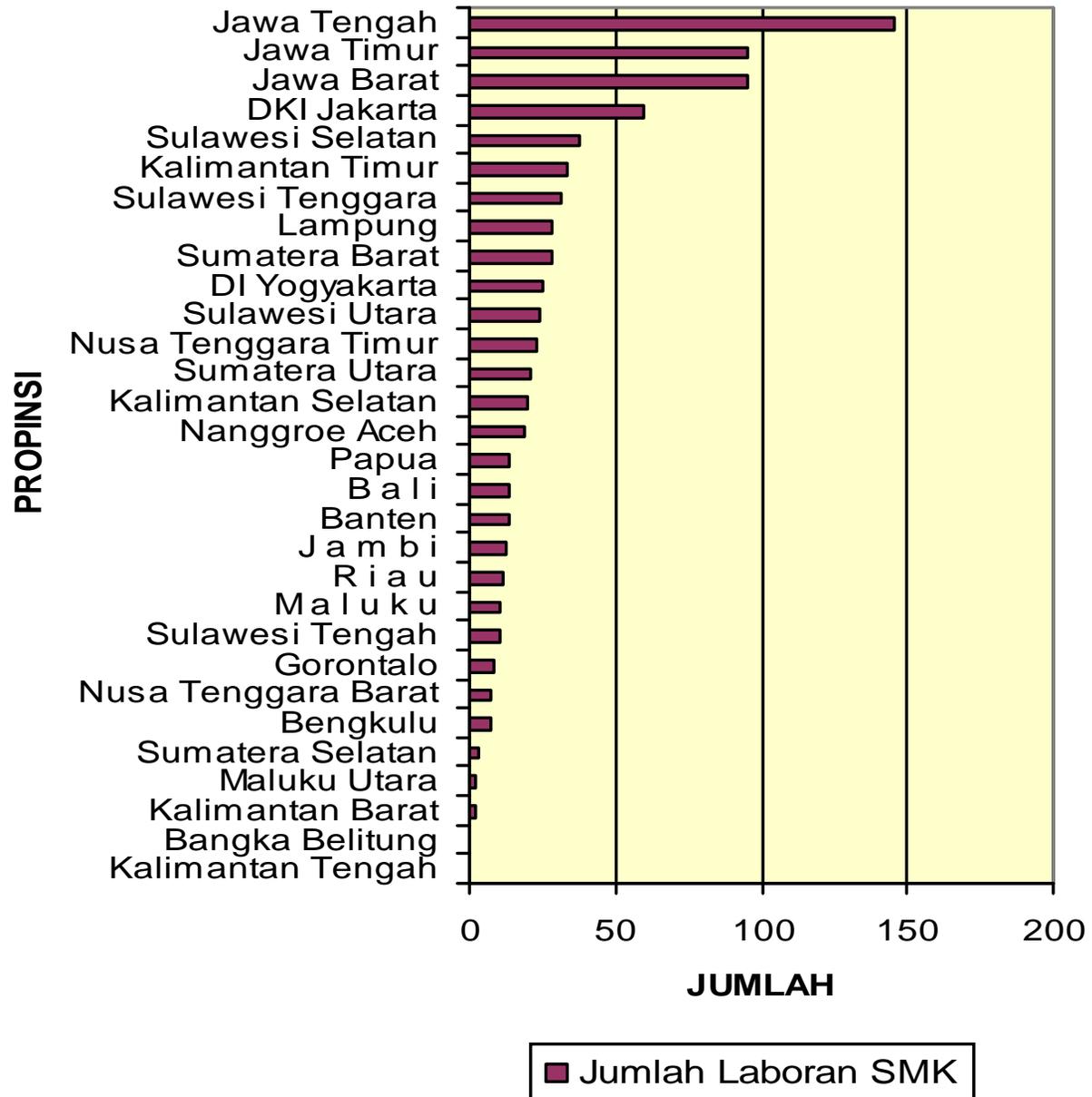
## JUMLAH LABORAN SMA NEGERI DAN SWASTA TIAP PROPINSI DI INDONESIA



# JUMLAH LABORAN SMK



## JUMLAH PEGAWAI LABORAN SMK TIAP PROPINSI DI INDONESIA

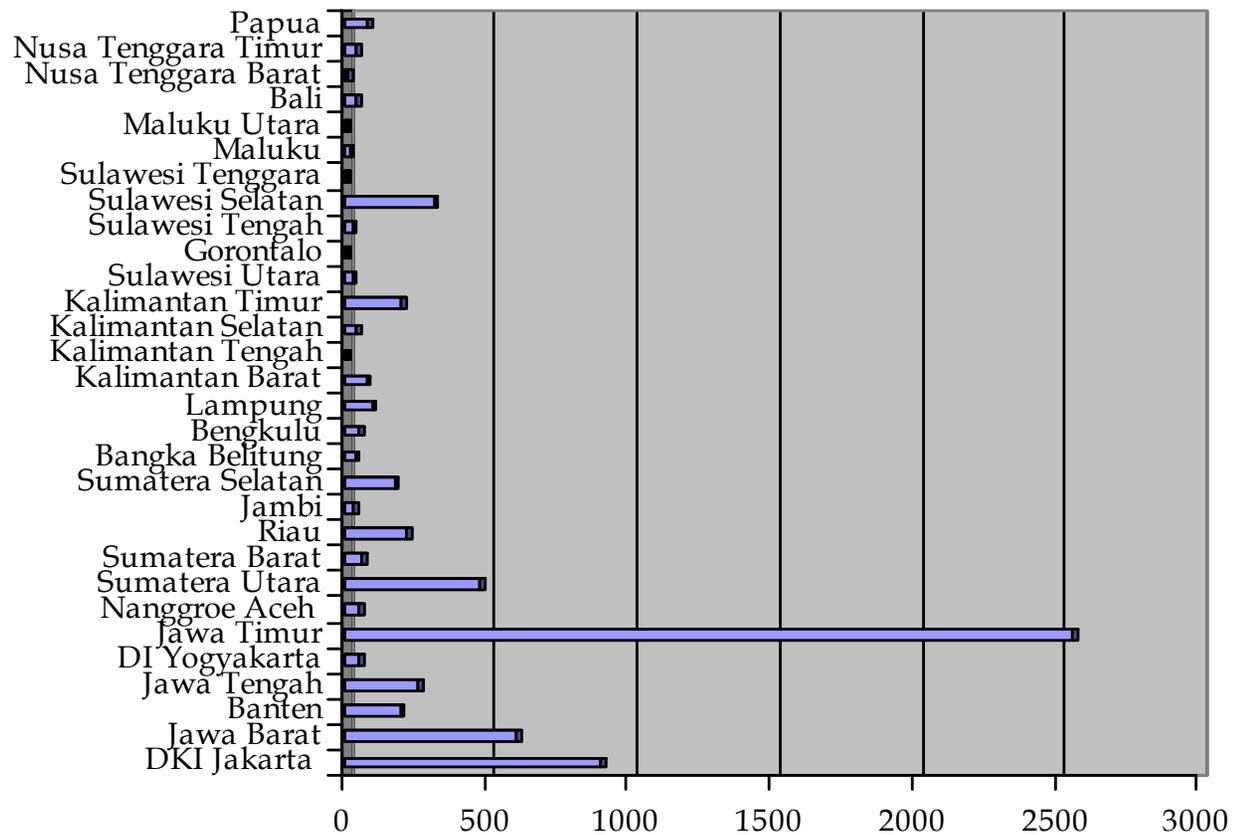


# PROFIL TENAGA ADMINISTRASI

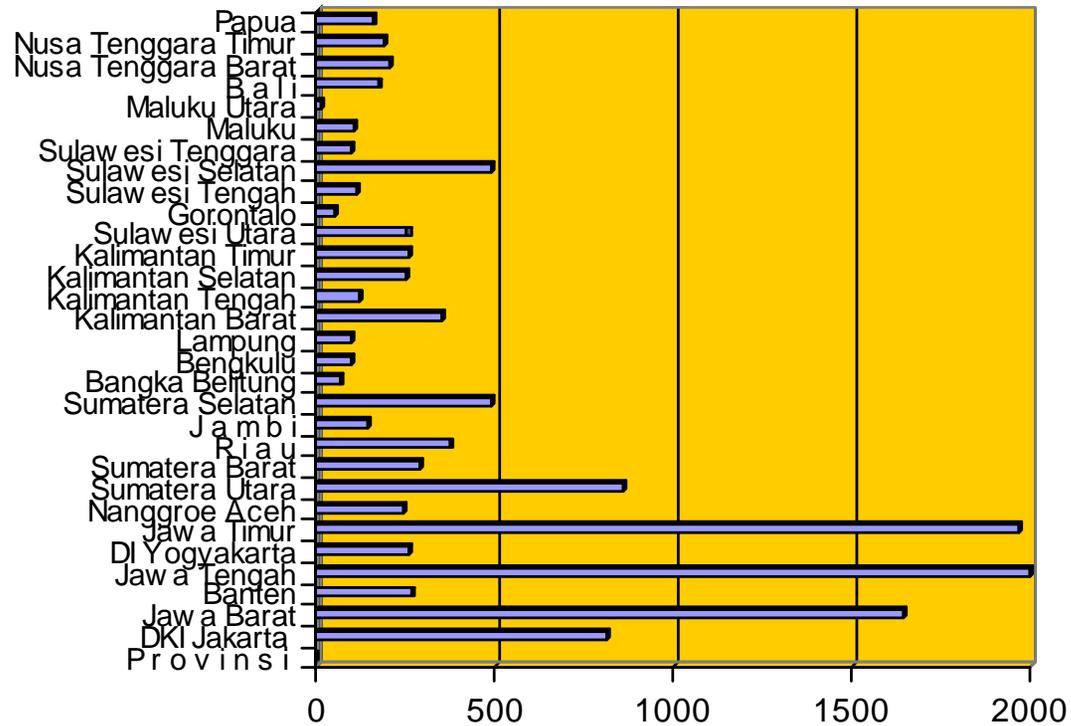
## Jumlah Tenaga

<b>Jenis Sekolah (jumlah Sekolah)</b>	<b>SD (144.962)</b>	<b>SMP (21.252)</b>	<b>SMA (12.579)</b>	<b>SMK (5.077)</b>
<b>T U</b>	<b>7.687</b>	<b>5.536</b>	<b>3.369</b>	<b>3.650</b>
<b>Bendahara</b>	<b>--</b>	<b>4.025</b>	<b>2.445</b>	<b>3.393</b>
<b>Juru Ketik</b>	<b>--</b>	<b>5.501</b>	<b>6.432</b>	<b>7.294</b>
<b>Penjaga</b>	<b>--</b>	<b>5.722</b>	<b>4.679</b>	<b>5.580</b>
<b>Jumlah</b>	<b>7.687</b>	<b>20.784</b>	<b>35.439</b>	<b>19.917</b>

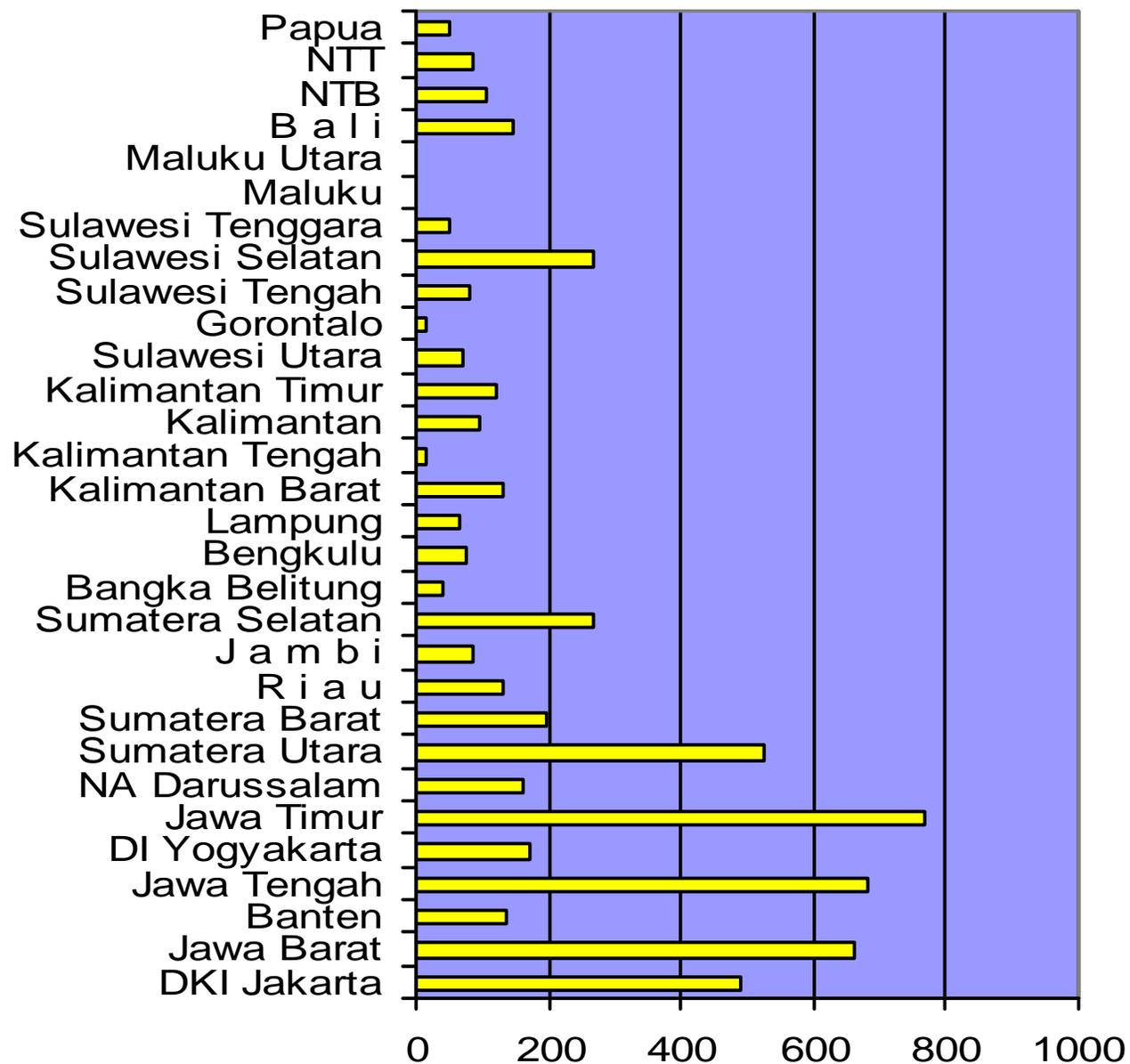
## JUMLAH PEGAWAI ADMINISTRASI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA TAHUN 2001-2002



# JUMLAH PEGAWAI TATA USAHA SMP NEGERI DAN SWASTA TH. 2003/2004



## Jumlah Tata Usaha SMA

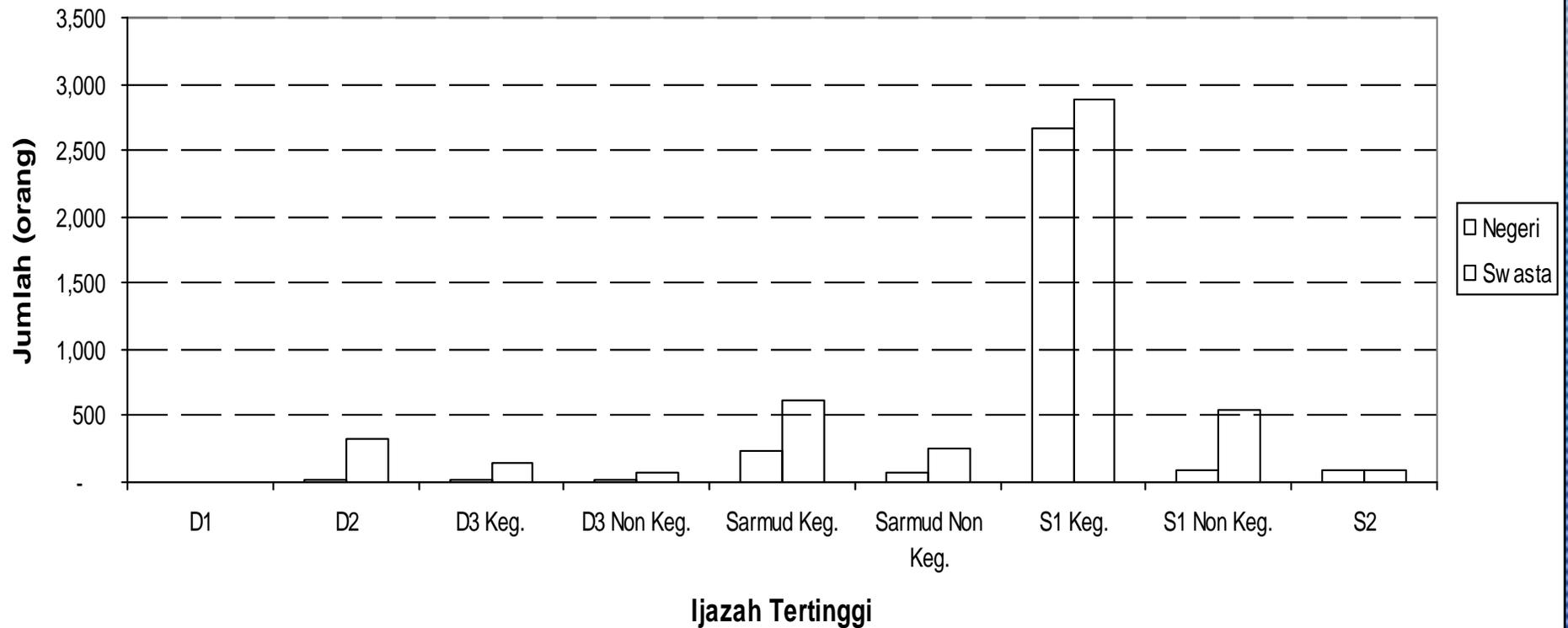




# **PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI**

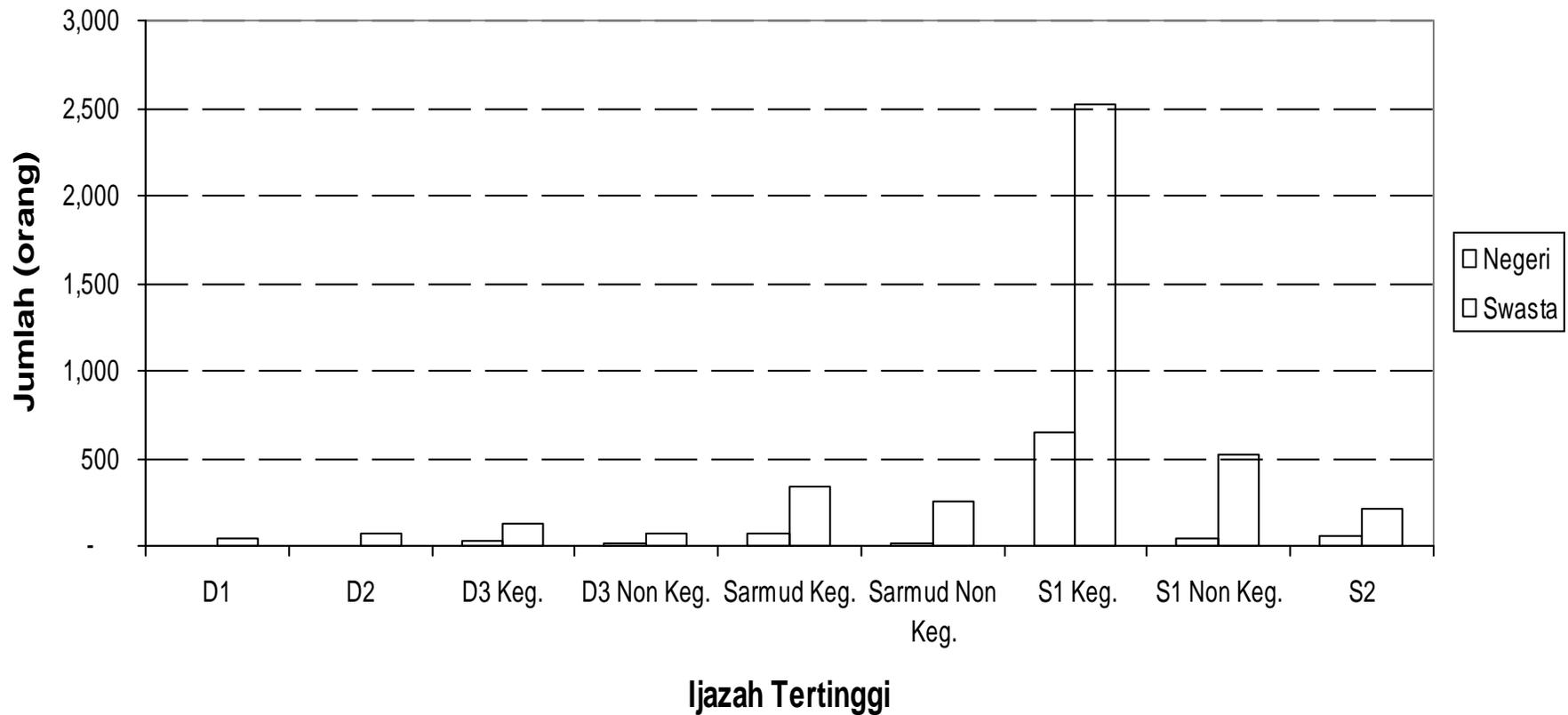
# JENJANG PENDIDIKAN KEPALA SMA

Jumlah Kepala SMA Menurut Ijazah Tertinggi



# JENJANG PENDIDIKAN KEPALA SMK

Jumlah Kepala SMK Menurut Ijazah Tertinggi





***GOVERNANCE,***  
**AKUNTABILITAS DAN**  
**PENCITRAAN PUBLIK**

# **GOVERNANCE, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK**

**Sistem  
Informasi  
Tendik belum  
dapat  
diakses oleh  
berbagai  
Pihak Terkait**

**Pemetaan  
Kebutuhan  
dan Profil  
Tendik  
belum  
memadai**

**Sistem  
Pengembangan  
KARIR TENDIK  
Perlu diperbaiki**

**Sistem  
Penghargaan  
bagi Tendik  
perlu  
ditingkatkan**

**Sistem  
Penilaian  
Kinerja  
Tendik perlu  
dirumuskan  
dan di Tata  
Ulang**

# AGENDA KEBIJAKAN DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN

## A. PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES

- KECUKUPAN JUMLAH.
- SEBARAN PENEMPATAN.
- PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN MUTU.
- FORUM KOMUNIKASI.
- MEDIA INFORMASI: JURNAL, MAJALAH, CD, VCD, INTERNET, E-MAIL, RADIO, TV EDUKASI.
- PUSAT AKSES PEMBELAJARAN MANDIRI.

# AGENDA KEBIJAKAN DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN

## B. PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI

- PENINGKATAN KUALIFIKASI & KOMPETENSI
  - STANDAR KOMPETENSI
  - UJI KOMPETENSI
  - SERTIFIKASI
- PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIR.
- PENGEMBANGAN SISTEM DAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA, KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PERLINDUNGAN.

# AGENDA KEBIJAKAN DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN

## C. GOVERNANCE, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK

- SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS ICT.
- PERUMUSAN, FASILITASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN.
- PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.
- PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN MENUJU *BENCHMARK* NASIONAL, REGIONAL & INTERNATIONAL.
- PENGEMBANGAN KEMITRAAN DENGAN LPTK DAN INSTANSI/ORGANISASI TERKAIT DALAM *PRESERVICE* DAN *INSERVICE TRAINING*.
- FASILITASI DALAM KONSULTASI BANTUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN.
- SOSIALISASI KEBIJAKAN.

# TONGGAK-TONGGAK KUNCI KEBERHASILAN 2006-2010

## 2006-2007:

- ◆ Tersedia informasi tenaga kependidikan secara on-line.
- ◆ Terbangun sistem perencanaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan.
- ◆ Terbangun rencana induk pengembangan mutu tenaga kependidikan.
- ◆ Diterapkan standar kompetensi dan sistem sertifikasi tenaga kependidikan.

- 
- ❑ Dimulai pengembangan kemitraan dengan LPTK dan instansi/ organisasi terkait dalam *preservice training* dan *inservice training* bagi tenaga kependidikan.
  - ❑ Dimulai penerapan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan kesejahteraan tenaga kependidikan.
  - ❑ Tersedia layanan bantuan hukum bagi tenaga kependidikan di setiap propinsi.
  - ❑ Tersosialisasi kebijakan dan program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui berbagai forum dan media.

## 2008

- Diterapkan standar pelatihan dan pengembangan tenaga kependidikan.
- Diterapkan sistem penilaian kinerja, penghargaan, dan kesejahteraan tenaga kependidikan bersertifikat profesi.

# 2009

20% Kabupaten/Kota yang mengalami kekurangan / ketidakmerataan tenaga kependidikan (terutama petugas perpustakaan dan laboran) terpenuhi.

40% Tenaga kependidikan profesional (minimal berpendidikan S1/D4).

# 2010

- ➔ 25% kebutuhan tenaga kependidikan (laboran, pustakawan, dan teknisi lainnya) terpenuhi.
- ➔ Akreditasi satuan pendidikan dasar dan menengah mencapai 100%.
- ➔ Diterapkan penjaminan mutu di semua satuan pendidikan.

# PROGRAM DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2006

## ■ **PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES**

### ■ Sistem Informasi Manajemen

- Pemetaan Tenaga Kependidikan (Validasi/Verifikasi Data, Analisis, Laporan)
- Informasi hasil Uji Kompetensi, Sertifikasi dan registrasi
- Informasi kebijakan dan program pengembangan tenaga kependidikan

## ◆ MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING

- ◆ Penyusunan konsep kebijakan pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan (kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, regridasi)
- ◆ Penyusunan konsep profesionalisme tenaga kependidikan (*retraining & capacity buliding*)
- ◆ Uji kompetensi
  - ◆ Memantapkan sistem uji kompetensi dan sertifikasi
  - ◆ Penyusunan dan pengembangan instrumen standar kompetensi
  - ◆ Validasi standar kompetensi tenaga kependidikan
  - ◆ Pelaksanaan uji kompetensi (kepala sekolah)

- ◆ Benchmark pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan ke negara ASEAN, ASIA, Australia dan Eropa.
- ◆ Peningkatan manajerial skill pengawas sekolah, kepala sekolah, dan TU sekolah (*capacity building*)
- ◆ Peningkatan mutu pendidikan di sekolah Daerah Tertinggal melalui kemitraan kepala sekolah DT-DM Angkatan III (lanjutan) → Pola program :  
*OJT/Benchmarking* mutu di sekolah DM → implementasi program-program peningkatan mutu di sekolah DT
- ◆ Pengimbasan program kemitraan sekolah KTI/DI kepada sekolah sekitar yang dinilai telah berhasil dalam peningkatan mutu → dengan pola program kemitraan kepala sekolah (*OJT/Benchmarking* di sekolah DM dan di sekolah Inti KTI/DT – implementasi program-program peningkatan mutu di sekolah Imbas KTI/DT

## ■ **GOVERNANCE, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK**

- **Bantuan langsung (*Block Grant*) forum ilmiah tenaga kependidikan tingkat Nasional**
  - **Workshop** program pemberian subsidi melibatkan berbagai kalangan terkait dan relevan untuk memperoleh masukan program yang tepat dan sesuai
  - **Rapat koordinasi** program pemberiaan subsidi dengan dinas pendidikan propinsi, kabupaten kota dan LPMP
  - **Pemberian subsidi** untuk kegiatan ilmiah dalam rangka peningkatan mutu tenaga kependidikan
- **Penyusunan konsep pengharagaan, perlindungan dan kesejahteraan (sistem remunerasi, perlindungan profesi dan kebebasan akademis, kode etik, dan pemberian tanda jasa kehormatan)**
- **Pemberian Penghargaan** bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi, dikaitkan dengan momentum HUT Kemerdekaan RI atau HARDIKNAS

# HUBUNGAN KEMITRAAN

Lembaga  
Luar negeri,  
Regional,  
Internasional

LPMP

LPTK/  
Organisasi  
sejenis

Direktorat  
Tenaga  
Kependidikan

Dinas  
Pendidikan  
Propinsi

Asosiasi  
Profesi  
Tendik

Dinas  
Pendidikan  
Kab/Kota,  
Pengawas

Sekolah

## • **Direktorat Tendik ----- LPMP**

- Koordinasi penjaminan mutu Tendik.

## • **Direktorat Tendik ----- Dinas Pendidikan Propinsi**

- Koordinasi program-program dekonsentrasi peningkatan mutu Tendik.
- Kerja sama perumusan, fasilitasi, evaluasi kebijakan peningkatan mutu Tendik.

## • **Direktorat Tendik ----- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pengawas**

- Koordinasi program-program desentralisasi peningkatan mutu Tendik.
- Kerja sama perumusan, fasilitasi, evaluasi kebijakan peningkatan mutu Tendik.



## ■ Direktorat Tendik ----- Asosiasi profesi Tendik

- ▶ Kerja sama perumusan, fasilitasi, evaluasi kebijakan peningkatan mutu Tendik.

## ■ Direktorat Tendik ----- Sekolah

- ▶ Kerja sama perumusan, fasilitasi, evaluasi kebijakan peningkatan mutu Tendik.

## ■ Direktorat Tendik ----- LPTK/ Organisasi sejenis

- ▶ Kerja sama peningkatan mutu Tendik.

## ■ Direktorat Tendik ----- Lembaga luar negeri, regional, internasional

- ▶ *Benchmark* mutu Tendik kompetitif global;
- ▶ Kerja sama peningkatan mutu Tendik.



